BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

OPD | KABAG HUKUM

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

OPD | KABAG HUKUM

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

OPD | KABAG HUKUM

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 447);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Belanja Operasi Adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari yeng memberikan manfaat jangka pendek, seperti pembiayaan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa untuk operasional kantor, serta pengeluaran lainnya yang bersifat mendasar.

11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membeli atau membiayai pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan menfaat lebih dari satu tahun anggaran.

OPD | KABAG HUKUM

12. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk memperolah barang dan jasa yang habis pakai atau memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik operasioanl maupun non-operasional.

13. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

15. Belanja Bunga adalah Pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga atas utang yang dimiliki pemerintah daerah, baik utang itu sndiri maupun biaya-biaya terkait pinjaman.

16. Belanja Hibah adalah pengeluaran APBD yang diberikan kepada entitas lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain,badan/Lembaga, atau organisasi kemsyarakatan yang berbadan hukum.

17. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk transfer uang,barang,atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari resiko social dan meningkatkan kesejahteraan.

18. Belanja Penyertaan Modal Daerah adalah pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan melalui APBD untuk diinvestasikan ke dalam bentuk modal pada badan usaha, baik BUMN, BUMD, maupun BUMDes

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 986.817.973.926,37 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Rp. 95.198.473.154,41 (Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 37.412.225.703,32 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b se besar Rp. 45.208.889.511 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sebelas).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.972.469.064 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. Rp. 6.604.888.876,09 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 37.412.225.703,32 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
   i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);dan
   k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 189.973.100 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.019.067.241 (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 361.185.500 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.640.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 125.400.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 5.332.505.380 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

(11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.10.190.697.988 (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 9.116.650.780 (Sembilan Milyar Seratus Enambelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 6

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp.45.208.889.511 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.43.483.614.811(Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empatbelas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri dari :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 42.991.525.679 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp. 117.469.932 (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 89.700.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
   d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 284.919.200 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.525.274.700 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
   a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 114.600.000 (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

OPD | KABAG HUKUM

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 10.848.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 84.742.200,00 (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
e. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp. 399.400.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp. 193.280.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
g. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebesar Rp. 3.559.500 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp. 593.845.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp 5.972.469.064 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 6.604.888.876,09 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
e. pendapatan dari pengembalian;
f. pendapatan BLUD;
g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; dan
h. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

OPD KABA... HUK...M

(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.633.278.118 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapanbelas Rupiah) yang terdiri atas:
   a. Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara sebesar Rp. 1.850.000 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
   b. Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp. 2.631.428.118 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Delapanbelas Rupiah).

(5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Huruf d sebesar Rp. 211.649.395,39 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

(6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 476.212.367,70 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Rupiah).

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 257.833.329 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

(9) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 5.915.666 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.843.486.856.226,96 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Koma sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
   b. Dana Bagi Hasil (DBH);
   c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
   d. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
   e. pendapatan transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 770.683.155.800 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
   a. Dana Desa sebesar Rp. 98.198.075.000 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
   b. Insentif Fiskal sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
   c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 6.465.791.000 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 6.465.791.000 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
   a. DBH Pajak sebesar Rp. 2.343.861.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
   b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp. 2.976.973.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
   c. DBH Lainnya sebesar Rp. 1.144.957.000 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

(4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 507.253.215.000 (Lima Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
   a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp. 489.492.437.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
   b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
   c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp. 8.606.629.000,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
   d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp. 8.154.149.000 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.158.766.074.800 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
   a. DAK Fisik sebesar Rp. 938.105.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah);
   b. DAK Non Fisik sebesar Rp.157.827.969.800 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

(6) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.72.803.700.426,96 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari pendapatan bagi hasil pajak yang terdiri dari :
   a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 4.630.305.900 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
   b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 2.530.395.832 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
   c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.39.376.155.541,96 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah);
   d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp. 476.853.025 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima Rupiah); dan



e. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp. 25.789.990.128 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 4.533.742.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Sebesar Rp. 4.533.742.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 956.305.778.526,37 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri :
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp.760.149.996.266 (Tujuh Ratus Enam Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Hibah;dan
   e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 493.480.044.315 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 252.063.199.458 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 576.562.240 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 13.775.190.253 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 494.801.712.215 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Duabelas Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
   e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
   f. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 350.400.967.058 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.125.791.074.514 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 16.217.496.792 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 554.225.951 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar 252.063.199.458 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belana perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOSP;
   g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
   h. belanja barang dan jasa BLUD

OPD | KABAG HUKUM

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 42.479.572.372 (Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 78.996.890.223 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.965.230.600 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.096.649.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.873.652.500 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 27.860.758.765 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 15.470.508.510 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 40.449.959.488 (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 576.562.240 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d sebesar Rp. Rp. 13.775.190.253 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
   d. Belanja hibah dana BOSP.



(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.102.500.000 (Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.341.715.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
d. belanja hibah kepada koperasi;
e. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;dan
f. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 1.960.500.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 2.829.715.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Limabelas Ribu Rupiah).

(6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp.484.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

(7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

(8) belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dimaksud pada ayat (3) huruf e sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(9) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 694.765.253 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(10) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 694.765.253 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp.39.081.693.050 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 19

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp. 7.386.389.197 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari :
   a. Belanja modal alat besar;
   b. Belanja modal alat angkutan;
   c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. Belanja modal alat pertanian;
   e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
   g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. Belanja modal alat laboratorium;
   i. Belanja modal komputer;
   j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
   k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
   l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;dan
   m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 12.229.000 (Duabelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.550.000 (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 900.040.079 (Sembilan Ratus Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 65.111.000 (Enam Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 154.797.818,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapanbelas Rupiah).



(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 21.547.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 495.403.980 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 65.160.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 3.099.328.800 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 2.535.521.520 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 20

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp. 2.321.664.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.921.664.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

(3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp. 24.741.677.053 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 22.844.434.053 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari :
a. belanja modal jalan;
b. Belanja modal bangunan air;



(3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 20.349.337.302 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.897.243.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bangunan air irigasi;
b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;dan
c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;

(5) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebesar Rp. 914.340.000 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebesar Rp. 632.254.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

(7) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebesar Rp. 350.649.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 22

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sebesar Rp. 4.631.962.800 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
a. Belanja modal bahan perpustakaan;
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.dan

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 49.775.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(3) Belanja modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.582.187.800 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 23

(1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebesar Rp. 2.015.795.210,37 (Dua Milyar Limabelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).



(2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sebesar Rp.155.058.294.000 (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
a. Belanja bagi hasil dan
b. Belanja bantuan keuangan

(3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 3.962.959.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 151.095.335.000 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 30.512.195.400 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 17.425.488.255 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
a. penyertaan modal daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

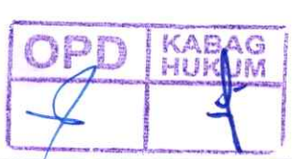
(4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

(5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 16.425.488.255 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 26

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. - 13.086.707.145 (Difisit Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. Rp. 13.086.707.145 (Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).



Pasal 27

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. Lampiran VIII : Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

j. Lampiran X : Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Bupati penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;

k. Lampiran XI : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang;

Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 50

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95.198.473.154,41**
4.1.01	Pajak Daerah	37.412.225.703,32
4.1.01.09	Pajak Reklame	361.185.500,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	354.984.500,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	354.984.500,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	6.201.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	6.201.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.745.714,32
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	9.745.714,32
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	9.745.714,32
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.332.505.380,00
4.1.01.15.001	PBBP2	5.332.505.380,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	5.332.505.380,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.701.440.341,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.019.067.241,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	2.019.067.241,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	9.360.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	9.360.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	189.973.100,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	156.013.100,00
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	33.960.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	125.400.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	125.400.000,00

OPD KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.190.697.988,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	10.190.697.988,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	10.190.697.988,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.116.650.780,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	9.116.650.780,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	9.116.650.780,00
4.1.02	Retribusi Daerah	45.208.889.511,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.483.614.811,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.991.525.679,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	17.586.625.679,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.404.900.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	117.469.932,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	117.469.932,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.700.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.700.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	284.919.200,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	179.971.200,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	52.148.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.525.274.700,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	114.600.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	41.400.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	12.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	61.200.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.848.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.848.000,00
4.1.02.02.006	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	84.742.200,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00
4.1.02.02.011.00004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	19.942.200,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	399.400.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	399.400.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.015	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	3.559.500,00
4.1.02.02.015.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	3.559.500,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	193.280.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	193.280.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	593.845.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	593.845.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.972.469.064,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.972.469.064,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.972.469.064,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.972.469.064,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.604.888.876,09
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.633.278.118,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.631.428.118,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.631.428.118,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	211.649.395,39
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	211.649.395,39
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	211.649.395,39
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	476.212.367,70
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	476.212.367,70
4.1.04.15.008.00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	476.212.367,70
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	257.833.329,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	142.850.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	142.850.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	114.983.329,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	114.983.329,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00
4.1.04.19.001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00
4.1.04.19.001.00001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	5.915.666,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.915.666,00
4.1.04.27.001.00156	Pendapatan Denda Opsen PKB	5.003.091,00
4.1.04.27.001.00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	912.575,00
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**843.486.856.226,96**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.683.155.800,00
4.2.01.05	Dana Desa	98.198.075.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	98.198.075.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	98.198.075.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.465.791.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	2.343.861.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	611.384.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	1.732.477.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.976.973.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	1.708.568.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	910.738.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	48.453.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.065.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	295.149.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	1.144.957.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	1.144.957.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	507.253.215.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	489.492.437.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	489.492.437.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	17.760.778.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.606.629.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.154.149.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	158.766.074.800,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	938.105.000,00
4.2.01.09.001.00013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	938.105.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	157.827.969.800,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.621.540.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	892.000.000,00

OPD | KASAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	87.152.237.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	423.297.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.888.500.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	702.350.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.466.619.800,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	443.899.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.284.527.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.803.700.426,96
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.803.700.426,96
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.803.700.426,96
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.630.305.900,00
4.2.02.01.001.00002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.530.395.832,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.376.155.541,96
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	476.853.025,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.533.742.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.533.742.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.533.742.000,00
4.3.01.04.003	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.533.742.000,00
4.3.01.04.003.00001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.533.742.000,00
	Jumlah Pendapatan	**943.219.071.381,37**
5	**BELANJA DAERAH**	
5,1	**BELANJA OPERASI**	**760.149.996.266,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	493.480.044.315,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	350.400.967.058,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	261.032.082.037,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	207.502.179.237,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	53.529.902.800,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.291.632.799,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.797.444.027,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.494.188.772,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.362.930.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.362.930.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.834.125.950,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.679.145.950,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	154.980.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.593.131.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.598.741.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.994.390.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.896.377.810,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.936.476.850,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.959.900.960,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.567.062.782,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.567.062.782,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.386.045,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.431.873,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	954.172,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.910.870.211,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.911.636.697,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.999.233.514,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	774.892.545,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	624.793.967,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.098.578,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.324.677.636,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.874.381.901,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	450.295.735,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	809.798.243,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	659.223.599,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	150.574.644,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	125.791.074.514,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.288.341.418,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.913.777.418,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.374.564.000,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.882.199.096,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.352.616.296,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	529.582.800,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.620.534.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.566.612.956,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	283.223.600,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	45.000.000,00

OPD KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	19.585.624.044,00
5.1.01.02.006.00071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	140.073.400,00
5.1.01.02.006.00072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.217.496.792,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	7.820.400,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	7.820.400,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.302.300,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.302.300,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.150.000,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.150.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.198.260,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.198.260,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.185.046.632,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	69.811.560,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.108.800.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.458.400.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.458.400.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.930.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.930.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	554.225.951,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.670.200,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.670.200,00

OPD KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.078.510,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.078.510,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	640.635,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	640.635,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.357,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.357,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.368.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.368.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	161.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	481.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	374.122.249,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.611.855,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	97.457,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	53.325.053,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.000.000,00
5.1.01.05.010.00018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	3.000.000,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	117.014.403,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	101.906.980,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	91.166.501,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.400.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	5.400.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	5.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.063.199.458,00
5.1.02.01	Belanja Barang	42.479.572.372,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	42.357.166.722,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.174.960.784,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.888.646.800,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.598.013.380,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	35.253.000,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.000.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	112.830.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.900.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	87.799.400,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.548.900,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	123.665.070,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.290.000,00
5.1.02.01.001.00018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	750.000,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.080.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	51.052.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.578.646.100,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.364.577.110,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.161.293.500,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	158.470.000,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	7.025.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.321.303.200,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	337.045.042,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	870.914.460,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	478.235.750,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.390.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	266.380.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	968.840.150,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.579.826.950,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.942.350.500,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.262.078.126,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.292.804.300,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	24.069.000,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	10.045.000,00
5.1.02.01.001.00049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	128.100.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.999.645.500,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.929.294.500,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	177.480.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	555.675.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	646.363.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.800.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.386.200,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.339.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.436.450,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.400.000,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	14.710.000,00
5.1.02.01.002.00013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	2.326.450,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	103.969.200,00
5.1.02.01.004.00061	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	400.000,00
5.1.02.01.004.00116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.390.000,00
5.1.02.01.004.00121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.308.400,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.560.800,00
5.1.02.01.004.00410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	25.910.000,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	200.000,00
5.1.02.01.004.00493	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	24.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.996.890.223,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	51.207.049.157,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	47.750.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.249.550.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	981.317.786,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.000.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	19.500.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	356.700.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.160.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	153.800.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	626.850.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	489.600.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.296.222.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	10.500.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.948.306.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.279.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	714.900.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	31.400.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	74.385.000,00
5.1.02.02.001.00021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	84.000.000,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	20.000.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	69.350.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	252.500.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.499.405.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.255.029.540,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.200.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	57.200.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	27.350.400,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.600.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	17.000.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	242.000.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.000.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	179.489.687,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	74.500.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	25.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.341.900.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	192.800.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	218.450.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	1.877.030.000,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.632.895.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.437.102.244,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	670.831.500,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	859.475.000,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.640.000.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	188.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.144.800.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	3.252.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	4.550.400.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	12.718.800.000,00

OPD KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.798.082.776,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.709.674.344,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.264.700.400,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	426.889.344,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	396.818.688,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.657.780.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.592.520.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.200.000,00
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.004.00103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	240.600.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	97.975.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	437.750.000,00
5.1.02.02.004.00128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.735.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
5.1.02.02.004.00416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	70.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	957.425.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	83.750.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.200.000,00
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	376.200.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	43.100.000,00
5.1.02.02.005.00039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	10.000.000,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.500.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	343.450.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.225.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	236.500.000,00
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	186.000.000,00
5.1.02.02.007.00031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.02.007.00033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	48.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.840.500.000,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.000.000,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	3.796.500.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	29.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	483.860.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	430.000.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	53.860.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.585.531.000,00

OPD KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.383.491.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	182.040.000,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.230.162.290,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.230.162.290,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.965.230.600,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	9.000.000,00
5.1.02.03.001.00005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	9.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.535.969.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	111.460.000,00
5.1.02.03.002.00024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	14.500.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	786.150.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	433.000.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	76.400.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	48.000.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.000.000,00
5.1.02.03.002.00086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	159.799.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.200.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	39.180.000,00
5.1.02.03.002.00125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00
5.1.02.03.002.00126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	5.400.000,00
5.1.02.03.002.00131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	4.600.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	25.000.000,00
5.1.02.03.002.00232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	55.500.000,00
5.1.02.03.002.00237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.800.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	232.310.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30.980.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.940.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	9.750.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285.421.600,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.421.600,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.134.840.000,00
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	814.840.000,00
5.1.02.03.004.00083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	320.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.096.649.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.096.649.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.059.864.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.077.020.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.941.305.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.460.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.873.652.500,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.182.640.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	407.250.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	775.390.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.691.012.500,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.691.012.500,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.860.758.765,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	27.405.716.765,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	26.568.716.765,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	837.000.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	398.798.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	398.798.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	56.244.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	56.244.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.470.508.510,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.470.508.510,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.470.508.510,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.319.937.488,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.319.937.488,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.319.937.488,00
5.1.03	Belanja Bunga	576.562.240,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	576.562.240,00
5.1.03.04.002	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	576.562.240,00

OPD | KASUBAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03.04.002.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	576.562.240,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.775.190.253,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.102.500.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.037.500.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.037.500.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	65.000.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	65.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.341.715.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.500.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.500.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.829.715.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.829.715.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	484.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	484.000.000,00
5.1.05.05.004	Belanja Hibah kepada Koperasi	10.000.000,00
5.1.05.05.004.00001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	10.000.000,00
5.1.05.05.005	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	7.500.000,00
5.1.05.05.005.00001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	7.500.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	694.765.253,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	694.765.253,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	694.765.253,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.636.210.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.688.540.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.688.540.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.381.590.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.381.590.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	566.080.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	566.080.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	255.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	255.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	255.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	255.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5,2	**BELANJA MODAL**	**39.081.693.050,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.386.389.197,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.229.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	12.229.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	12.229.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.550.000,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.550.000,00
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	8.550.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.700.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.700.000,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	900.040.079,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	98.217.500,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.597.500,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	80.620.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	740.881.779,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	354.913.000,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.400.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	25.798.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	17.925.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	337.845.779,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.940.800,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.560.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.380.800,00
5.2.02.05.003.00006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	30.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	65.111.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	47.611.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	47.611.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	17.500.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	154.797.818,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	154.797.818,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	154.797.818,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	21.547.000,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.797.000,00
5.2.02.08.001.00041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.797.000,00

OPD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.750.000,00
5.2.02.08.007.00004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	19.750.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	495.403.980,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	279.505.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	262.405.000,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	17.100.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	215.898.980,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.850.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	177.048.980,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	25.000.000,00
5.2.02.13.001.00002	Belanja Modal Sumur Pemboran	25.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.160.000,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.160.000,00
5.2.02.19.001.00003	Belanja Modal Peralatan Senam	65.160.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.099.328.800,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.005.007.800,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.005.007.800,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	34.340.000,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	34.340.000,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	59.981.000,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	59.981.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.535.521.520,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.535.521.520,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.535.521.520,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.321.664.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.921.664.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.876.864.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	540.009.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	894.105.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	95.000.000,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	151.525.000,00
5.2.03.01.001.00033	Belanja Modal Bangunan Parkir	96.225.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	44.800.000,00
5.2.03.01.002.00004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	44.800.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.741.677.053,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.844.434.053,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	20.349.337.302,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	16.314.876.220,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	4.034.461.082,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	2.495.096.751,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.495.096.751,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.897.243.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	914.340.000,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	914.340.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	632.254.000,00
5.2.04.02.004.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	632.254.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	350.649.000,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	350.649.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.631.962.800,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.775.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	49.775.000,00
5.2.05.01.001.00002	Belanja Modal Buku Filsafat	11.866.850,00
5.2.05.01.001.00003	Belanja Modal Buku Agama	13.820.500,00
5.2.05.01.001.00004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	21.559.550,00
5.2.05.01.001.00005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	2.528.100,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.582.187.800,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.488.370.800,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.488.370.800,00
5.2.05.89.002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	73.772.000,00
5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	73.772.000,00
5.2.05.89.003	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.045.000,00
5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.045.000,00
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.015.795.210,37**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.015.795.210,37
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.015.795.210,37
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	2.015.795.210,37
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	2.015.795.210,37

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**155.058.294.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.962.959.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.741.222.600,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.741.222.600,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.741.222.600,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	221.736.400,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	221.736.400,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	221.736.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.095.335.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	151.095.335.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	151.095.335.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	98.198.075.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	52.897.260.000,00
	Jumlah Belanja	**956.305.778.526,37**
	Total Surplus/(Defisit)	**-13.086.707.145,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**30.512.195.400,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.512.195.400,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	30.000.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	512.195.400,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	512.195.400,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	512.195.400,00
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**17.425.488.255,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	16.425.488.255,00
6.2.07.01	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	16.425.488.255,00
6.2.07.01.001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah	16.425.488.255,00
6.2.07.01.001.00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah	16.425.488.255,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**17.425.488.255,00**
	Pembiayaan Netto	**13.086.707.145,00**
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**943.219.071.381,37**	
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95.198.473.154,41**	
4.1.01	**Pajak Daerah**	**37.412.225.703,32**	
4.1.01.09	Pajak Reklame	361.185.500,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	354.984.500,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	6.201.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**9.745.714,32**	
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	9.745.714,32	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**300.000.000,00**	
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**5.332.505.380,00**	
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	5.332.505.380,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**400.000.000,00**	
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**11.701.440.341,00**	
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	2.019.067.241,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	9.360.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	156.013.100,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	33.960.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	125.400.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.20	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**10.190.697.988,00**	
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	10.190.697.988,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.116.650.780,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	9.116.650.780,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**45.208.889.511,00**	
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**43.483.614.811,00**	
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	17.586.625.679,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.404.900.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	117.469.932,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.700.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	52.800.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	179.971.200,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	52.148.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.525.274.700,00**	
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	41.400.000,00	Perda No. 1 Th 2024

OPD KABAG HUKUM

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	12.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	61.200.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.848.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	64.800.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.011.00004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	19.942.200,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	399.400.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.015.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	3.559.500,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	193.280.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	593.845.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**200.000.000,00**	
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.972.469.064,00**	
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**5.972.469.064,00**	
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.972.469.064,00	Perda No. 1 Th 2024
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**6.604.888.876,09**	
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**1.500.000.000,00**	
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**1.500.000.000,00**	
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**2.633.278.118,00**	
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.850.000,00	
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.631.428.118,00	
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**211.649.395,39**	
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	211.649.395,39	
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**476.212.367,70**	
4.1.04.15.008.00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	476.212.367,70	
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**257.833.329,00**	
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	142.850.000,00	
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	114.983.329,00	
4.1.04.19	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**20.000.000,00**	
4.1.04.19.001.00001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00	
4.1.04.27	**Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah**	**5.915.666,00**	
4.1.04.27.001.00156	Pendapatan Denda Opsen PKB	5.003.091,00	
4.1.04.27.001.00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	912.575,00	
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**843.486.856.226,96**	
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**770.683.155.800,00**	
4.2.01.05	**Dana Desa**	**98.198.075.000,00**	
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	98.198.075.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025

OPD | KABAG HUKUM

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4.2.01.07	**Dana Bagi Hasil (DBH)**	**6.465.791.000,00**	
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	611.384.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	1.732.477.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	1.708.568.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	910.738.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	48.453.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.065.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	295.149.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	1.144.957.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**507.253.215.000,00**	
4.2.01.08.001.00001	DAU	489.492.437.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.606.629.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.154.149.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
			Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**158.766.074.800,00**	
4.2.01.09.001.00013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	938.105.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.621.540.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	892.000.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	87.152.237.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	45.000.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	423.297.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.888.500.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	702.350.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.466.619.800,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	443.899.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.284.527.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	Surat Dirjen Perimbangan Keu. No. S-62/PK/2025
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**72.803.700.426,96**	
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**72.803.700.426,96**	
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.630.305.900,00	
4.2.02.01.001.00002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.530.395.832,00	
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.376.155.541,96	
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	476.853.025,00	
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.789.990.128,00	
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.533.742.000,00**	
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**4.533.742.000,00**	
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.533.742.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

4.3.01.04.003.00001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	4.533.742.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Iklim Keamanan SD Iklim Kebinekaan SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Kebinekaan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 Skor Kemampuan Literasi SMP Iklim Inklusivitas SMP Skor Kemampuan Numerasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Iklim Inklusivitas SD		
Kegiatan	**: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		
Indikator Keluaran	: Jumlah alat praktik dan praga Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	82.500.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.871.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.384.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02	Belanja Jasa		

OPD KABAG HUKUM

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.229.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	980.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.776.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	880.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

Kegiatan	**: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Indikator Keluaran	: -

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	836.414.232,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	169.712.200,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	77.735.187,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.759.708,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.190.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.745.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.640.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.290.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	40.529.953,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.222.080,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.355.059,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.192,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.752,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	377.608.560,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36.750.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

OPD | KABAG HUKUM

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.798.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	380.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.762.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.958.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

Kegiatan	**: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Indikator Keluaran	: -

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	880.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

Kegiatan	**: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Indikator Keluaran	: -

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.603.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025

OPD | KABAG HUKUM

5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.250.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Kegiatan	**: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.746.800,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.150.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.020.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.814.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.070.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.920.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Kegiatan	**: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

OPD | KABAG HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	2.400.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.780.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.560.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.784.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.615.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.250.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.440.100,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.308.800,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.200.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	300.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.120.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	31.200.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Kegiatan	**: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.550.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.400.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
5	BELANJA DAERAH		
5,1	BELANJA OPERASI		

OPD | KARAG HUKUM

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	200.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	Permendagri No. 14 th. 2025
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	

Kab. Lampung Barat, 23 Desember 2025
Bupati

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. HIBAH BERUPA UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
1	Persatuan Wredatama Republi Indonesia (PWRI)	Way Mengaku Liwa Lampung Barat	40.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	40.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
2	DPK IKPATK Lampung Barat (Alumni IPDN)	Way Mengaku Liwa Lampung Barat	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	50.000.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
3	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	LIWA	75.000.000,00
4	Kodim 0422	Kelurahan Way Mengaku	200.000.000,00
5	Polda Lampung	Bandar Lampung	250.000.000,00
6	POLRES LAMPUNG BARAT (POLISI CILIK)	LIWA	25.000.000,00
7	Polres Lampung Barat	Wates	350.000.000,00
8	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat	Way Mengaku	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	950.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
9	DPC GRANAT Lampung Barat	Liwa	7.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	7.500.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
10	Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Jl. Lintas Liwa Pekon Gunung Sugih	10.000.000,00
11	BIDIK	Lampung Barat	7.500.000,00
12	PSHT KABUPATEN LAMPUNG BARAT	LIWA	15.000.000,00
13	DPC Kesti TTKDH Lampung Barat	BALIK BUKIT	7.500.000,00
14	TTKKDH Kabupaten Lampung Barat	Seblat	10.000.000,00
15	Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII)	Jl. Lintas Liwa-Ranau	7.500.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
16	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP)	BALIK BUKIT	7.500.000,00
17	PUJAKESUMA	Jl. Jenderal Sudirman Pemangku 02 Watas Timur	15.000.000,00
18	PO PENCAK DAN SENI KILU ANDAN	LIWA	5.000.000,00
19	PERADI	Jl. Pemasaran RK III	15.000.000,00
20	Lembaga Komunitas Peduli Rakyat (LKPR)	way mengaku liwa lampung barat	7.500.000,00
21	Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabaupaten Lampung Barat	Jalan Soekarno Hatta Pekon Sukarami,	10.000.000,00
22	POSPERA CABANG LAMPUNG BARAT	LIWA	5.000.000,00
23	LSM TRINUSA	Lampung Barat	10.000.000,00
24	Perguruan Paku Banten	Way Mengaku Liwa	10.000.000,00
25	PEMUDA PANCASILA	LIWA	25.000.000,00
26	PEMUDA BATAK BERSATU	Lampung Barat	7.500.000,00
27	PEJUANG SILIWANGI	SUMBER JAYA	20.000.000,00
28	LEMBAGA TRANSPARANSI KEBIJAKAN DAERAH	BATU BRAK	7.500.000,00
29	LASKAR MERAH PUTIH	LIWA	7.500.000,00
30	IKB BUMI BASWAY LAMPUNG BARAT	LIWA	10.000.000,00
31	GARUDA BAKTI NUSANTARA	Lintas Liwa No. 12 Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	7.500.000,00
32	FORUM MASYARAKAT PEDULI LAMPUNG BARAT (FMPLB)	Jl. Raden Intan Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa	15.000.000,00
33	Paguyuban Lampung Barat Bersatu	Liwa	15.000.000,00
34	PO Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Lampung Barat	Lampung Barat	7.500.000,00
35	PSHT PUSAT MADIUN KABUPATEN LAMPUNG BARAT	WAY MENGAKU	15.000.000,00
36	SENKOM MITRA POLRI	LIWA	7.500.000,00
37	SUZUKI KATANA JIMNY INDONESIA (SKIN) CHAPTER LAMPUNG BARAT	Lampung Barat	7.500.000,00
38	YAYASAN DKM PEDULI INDONESIA	Lampung Barat	5.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	300.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
39	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) LAMPUNG BARAT	LIWA	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	50.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
40	Partai Demokrat	Liwa	88.408.632,00
41	Partai Amanat Nasional (PAN)	Liwa	45.070.363,00
42	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Liwa	36.872.849,00
43	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Liwa	42.089.086,00
44	Partai Golongan Karya (Golkar)	Liwa	65.779.662,00
45	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Liwa	267.141.576,00

OPD KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
46	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Liwa	69.850.482,00
47	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Liwa	79.552.603,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	694.765.253,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.002.265.253,00
	BAGIAN HUKUM		
	Fasilitasi Bantuan Hukum		
48	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Liwa	Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	17.500.000,00
49	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat	Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	22.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	40.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD BAGIAN HUKUM	40.000.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
50	hibah KUA Kecamatan Batu Ketulis	Campang Tiga	0,00
51	hibah kepada kristen protestan	jln raden intan km 4 way mengaku kec balik bukit	10.000.000,00
52	hibah kepada khatolik yang berbadan hukum indonesia	way mengaku	10.000.000,00
53	hibah kepada Fatayat Nu	jln lintas air hitam sidorejo mutar alam kec way tenong	20.000.000,00
54	hibah kepada budayana	jln raden intan gg garpu way mengaku kec balik bukit	10.000.000,00
55	hibah kepada Baznas	pekon wates komplek sekuting kec balik bukit	125.000.000,00
56	hibah kepada aisyiah	Lampung Barat	17.500.000,00
57	hibah kepada PHDI yang berbadan hukum Indonesia	jln raden intan gg garpu kelurahan way mengaku kec balik bukit	7.500.000,00
58	hibah kepada LPTQ kecamatan	jln raden intan II no 1 way mengaku kec balik bukit	75.000.000,00
59	hibah kepada LPTQ lampung barat dalam rangka MTQ tingkat kabupaten	jln raden intan II no 1 way mengaku Kec Balik Bukit	375.000.000,00
60	hibah kepada BKPRMIL	jln jendral sudirman pekon wates kec balik bukit	10.000.000,00
61	hibah kepada hari santri	jln way mengaku kec balik bukit	35.000.000,00
62	Laskar Santri		15.000.000,00
63	hibah kepada pengajian baitul mukhlisin	jl raden intan 2 way mengaku kec balik bukit	100.000.000,00
64	hibah kepada panitia natal khatolik	jaln kelor way mengaku kec liwa	10.000.000,00
65	Hibah Kepada Panitia Natal Kristen Protestan	Liwa lampung barat	10.000.000,00
66	hibah kepada panitia natal oikumene	jln raden intan gg mawar kec balik bukit	10.000.000,00
67	Hibah Kepada Qiroatul kutub	Liwa lampung barat	5.000.000,00
68	hibah kepada rumah ibadah/ lembaga pendidikan keagamaan	jln raden intan way mengaku kec balik bukit	200.000.000,00
69	hibah kepada pengajian syalimah	way mengaku	7.500.000,00
70	hibah kepada NU	pekon wates kec balik bukit	75.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
71	hibah kepada muslimat Nu	kelurahan pasar liwa kec balik bukit	25.000.000,00
72	hibah kepada mui	pekon wates komplek sekuting kecamatan balik bukit	30.000.000,00
73	hibah kepada Muhammadiyah	jln jendral sulaiman no 43 liwa kec balik bukit	20.000.000,00
74	hibah kepada matha"ul anwar	Lampung Barat	10.000.000,00
75	hibah kepada LPTQ	jln raden intan II no 1 kec balik bukit	20.000.000,00
76	hibah kepada LDII	jln sersan sulaiman no 89 simpang serdang kec balik bukit	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	1.242.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.242.500.000,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
77	Lampung Barat Bersatu Bird Club	Jl. Rd. Intan No. 39, Way Mengaku, Kec Balik Bukit, Lampung Barat	30.000.000,00
78	Lampung Barat Creative Movement	Liwa	113.000.000,00
79	Hibah Kepada Ikatan Muli Mekhanai Kabupaten Lampung Barat (IMMKALAB)	Liwa	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	193.000.000,00
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		
80	PPI	liwa	20.000.000,00
81	IPPNU	liwa	10.000.000,00
82	pemuda muhamadiyah	liwa	10.000.000,00
83	GIP ANSOR	liwa	20.000.000,00
84	HIPMI	LAMPUNG BARAT	25.000.000,00
85	IKPM	liwa	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	135.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
86	Gowes suka suka	kegeringan batrubrak	10.000.000,00
87	LGC (komunitas goweser liwa)	way mengaku	35.000.000,00
88	KONI	waymengaku	700.000.000,00
89	PERWOSWI	way mengaku	35.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	780.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.108.000.000,00
	Dinas Kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
90	IBI	LAMPUNG BARAT	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	10.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
91	PPNI	Kab. Lampung Barat	15.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	15.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
92	Yayasan Jantung Indonesia	Lampung Barat	30.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	30.000.000,00
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
93	PMI (Palang Merah Indonesia) Lampung Barat	Jalan Raden Intan II, Nomor 001, Lingkungan Sukajadi 2, Kelurahan Way Mengaku,Kecamatan Balik Bukit,Lampung Barat	120.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	120.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kesehatan	175.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Relasi Media		
94	Jurnalis Maestro Indonesia	Lampung Barat	7.500.000,00
95	RAPI	Balik Bukit	10.000.000,00
96	SPJI (Sudut Pandang Jurnalis Indonesia)	Lampung Barat	17.500.000,00
97	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Lampung Barat	17.500.000,00
98	PWRI	Balik Bukit	27.500.000,00
99	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Balik Bukit	150.000.000,00
100	Persatuan Wartawan Duta Penda Indonesia (PWDPI)	Lampung Barat	17.500.000,00
101	KWRI	Way Mengaku	9.000.000,00
102	Ikatan Wartawan Online (IWO)	Way Mengaku	27.500.000,00
103	FPII	Lampung Barat	12.500.000,00
104	Forkowap (Forum Komunikasi Wartawan Purwasuka)	Way Mengaku	22.500.000,00
105	AWPI	Lampung Barat	35.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	354.000.000,00
			354.000.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
106	DEKOPINDA LAMPUNG BARAT	Jl. Lintas Liwa, depan Komplek Skuting Terpadu	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	10.000.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
107	Kamar Dagang dan Industri	Jl. Serssan Sulaiman No.43	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	10.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
108	FORUM KOMUNIKASI UMKM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Suka Utama I	7.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	7.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Koperasi	27.500.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
109	bumi sekala conservation	wates,balik bukit	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	10.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
110	Perkumpulan Bersatu Beguai Jejama Kabupaten Lampung Barat	GEDUNG SURIAN	12.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	12.500.000,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
111	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Pekon Purawiwitan Kebun tebu Lampung Barat	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	50.000.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
112	ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA (APDESI) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KAWASAN SEKUTING TERPADU	22.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	22.500.000,00
		JUMLAH HIBAH	85.000.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
113	Hibah Kepada ISPI Lampung Barat	Jl. Sersan Sulaiman No. 100 Kelurahan Way Mengaku	17.500.000,00
114	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Islam Lampung Barat	Lampung Barat	30.000.000,00
115	Hibah kepada PGRI	Lampung Barat	17.500.000,00
116	Hibah Kepada Pramuka Lampung Barat	Way Mengaku Kec. Balik Bukit Lampung Barat	40.000.000,00
117	HIMPAUDI	Jl. Mawar Way Mengaku Kec. Balik Bukit Lampung Barat	20.000.000,00
118	Komunitas GTK	SDN 1 Pampangan Jalan Raya Pampangan no 78 Pekon Pampangan	15.000.000,00
119	Hibah Kepada Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)	Simpang Serdang RT/RW 005/001 Way Mengaku Balik Bukit Lampung Barat	13.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	153.500.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		
121	Hibah Dalam Rangka BOP PAUD (3.769 Siswa x 610.000) (DAK Non Fisik-BOP PAUD)	Lampung Barat	2.299.090.000,00
122	Hibah Dana DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Lampung Barat	82.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	2.381.590.000,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
123	PKBM/Lembaga	Lampung Barat	476.080.000,00
124	PKBM/Lembaga	Lampung Barat	90.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	566.080.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
125	Belanja Hibah Uang Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	2.306.760.000,00
126	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	20.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	2.326.760.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
127	Belanja Hibah Uang Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	1.326.780.000,00
128	Belanja Hibah Uang Dana BOS Kinerja yang diterima oleh Satdikdas Swasta	Lampung Barat	35.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	1.361.780.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
129	LASQI	WAY MENGAKU	20.000.000,00
130	Dewan Kesenian Lampung Barat [Belanja Hibah Uang]	Lampung Barat	35.000.000,00
131	Sanggar Seni Bumi Sekala	Pekon Canggu	17.500.000,00
132	Sanggar Seni Cakra Buwana	Pekon Gedung Surian	5.000.000,00
133	SANGGAR SEBARUS SAI	Pekon Sebarus	5.000.000,00
134	Sanggar Seni PAGUYUBAN PASUNDAN	Lampung Barat	5.000.000,00
135	Sanggar Seni WONGKO INGGIL	Lampung Barat	5.000.000,00
136	SANGGAR GEMUTTUKH AGUNG[Belanja Hibah Uang]	Lampung Barat	5.000.000,00
137	SANGGAR SENI SETIWANG	Lampung Barat	40.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	137.500.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
138	PKBM/Lembaga	Lampung Barat	591.215.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	591.215.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
139	Kementerian Agama Lampung Barat	Lampung Barat	80.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	80.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
140	KEPAKSIAN BELUNGUH	PEKON KENALI	17.500.000,00
141	KEPAKSIAN BUAY BEJALAN DI WAY	PEKON KEMBAHANG	17.500.000,00
142	KEPAKSIAN NYERUPA	SUKAU	17.500.000,00
143	KEPAKSIAN PERNONG	BATU BRAK	17.500.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
144	KEPAKSIAN PERNONG	BATU BRAK	90.000.000,00
145	KEPAKSIAN PERNONG	BATU BRAK	20.000.000,00
146	MARGA LIWA	Lampung Barat	17.500.000,00
147	KEPAKSIAN BELUNGUH	PEKON KENALI	17.500.000,00
148	KEPAKSIAN BUAY BEJALAN DI WAY	PEKON KEMBAHANG	17.500.000,00
149	KEPAKSIAN NYERUPA	SUKAU	17.500.000,00
150	KEPAKSIAN PERNONG	BATU BRAK	90.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	340.000.000,00
			7.938.425.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal		
151	KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA KAB. LAMPUNG BARAT	Jl. Perintis No 133 Way Mengaku	5.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	5.000.000,00
	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		
152	Lembaga Hibah Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)	LIWA	20.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	20.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
153	Belanja Hibah WKRI	Lampung Barat	15.000.000,00
154	hibah kepada kristen protestan	jln raden intan km 4 way mengaku kec	15.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	30.000.000,00
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		
155	Hibah ke FKAD	Lampung Barat	45.000.000,00
156	Hibah Ke Persit Kartika Chandra	Lampung Barat	15.000.000,00
157	Hibah Ke GOW	Lampung Barat	45.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	105.000.000,00
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
158	Bhayangkari Kabupaten Lampung Barat	Lampung Barat	15.000.000,00
159	Organisasi Darma Wanita Persatuan Kab. Lampung Barat	Lampung Barat	95.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	110.000.000,00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
160	Hibah Kepada Genre	Lampung Barat	12.500.000,00
161	Belanja Hibah Kepada Organisasi PKBI	Lampung Barat	5.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	17.500.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	287.500.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Dinas Sosial		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
162	PEPABRI		10.000.000,00
163	Lembaga Berbadan Hukum (13 lembaga)	Liwa	10.000.000,00
164	LVRI		10.000.000,00
165	karang taruna indonesia (KTI)		20.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial	50.000.000,00
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
166	Serikat Tani Indonesia (Sertani) Kabupaten Lampung Barat	Balik Bukit	7.500.000,00
167	KTNA Kabupaten Lampung Barat	Balik Bukit	17.500.000,00
168	HKTI Kabupaten Lampung Barat	Balik Bukit	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	75.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	75.000.000,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
169	DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) LAMPUNG BARAT	Jl. Raden Intan Way Mengaku	250.000.000,00
170	RUMAH KREATIF LAMPUNG BARAT	Jl. Lintas Liwa Pekon Mutar Alam	15.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	265.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	265.000.000,00

B. HIBAH BERUPA BARANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
1	PENGADILAN AGAMA LIWA LAMPUNG BARAT	LIWA	LAPTOP	30.000.000,00
2	KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	LIWA	Kendaraan Pengumpul Sampah Tipe Motor	35.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	65.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.000.000,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B.PEMBANGUNAN	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

A. Bantuan Sosial Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
1	Bantuan sosial untuk anak yatim dan lansia 1.000 Orang	Lampung Barat	150.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	150.000.000,00
		JUMLAH BANSOS	150.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
2	Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana (2 Unit)	Lampung Barat	30.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	30.000.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
3	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (5 Unit)	Lampung Barat	75.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	75.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA	105.000.000,00

B. Bantuan Sosial Berupa Barang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
KOSONG				

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah **5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**			
Belanja Bantuan Keuangan			
A.	**Belanja Dana Desa**		
1.	Pekon Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 98.198.075.000,00
B.	**Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Pekon**		
1	Pekon Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 334.860.000,00
2	Pekon Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 465.960.000,00
3	Pekon Wates	Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit	Rp. 383.460.000,00
4	Pekon Padang Dalom	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit	Rp. 383.460.000,00
5	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	Rp. 359.160.000,00
6	Pekon Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	Rp. 475.560.000,00
7	Pekon Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	Rp. 621.360.000,00
8	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	Rp. 499.860.000,00
9	Pekon Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	Rp. 524.160.000,00
10	Pekon Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	Rp. 359.160.000,00
11	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Rp. 597.060.000,00
12	Pekon Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	Rp. 538.860.000,00
13	Pekon Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	Rp. 548.460.000,00
14	Pekon Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	Rp. 383.460.000,00
15	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	Rp. 490.260.000,00
16	Pekon Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	Rp. 383.460.000,00
17	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	Rp. 407.760.000,00
18	Pekon Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	Rp. 383.460.000,00
19	Pekon Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 359.160.000,00
20	Pekon Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 383.460.000,00
21	Pekon Lombok	Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 417.360.000,00
22	Pekon Heni Arong	Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 383.460.000,00
23	Pekon Suka Banjar	Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 383.460.000,00
24	Pekon Lombok Timur	Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 334.860.000,00
25	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 334.860.000,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
26	Pekon Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 383.460.000,00
27	Pekon Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 334.860.000,00
28	Pekon Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 383.460.000,00
29	Pekon Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 359.160.000,00
30	Pekon Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 334.860.000,00
31	Pekon Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 359.160.000,00
32	Pekon Simpang Sari	Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 465.960.000,00
33	Pekon Sukajaya	Pekon Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 393.060.000,00
34	Pekon Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 407.760.000,00
35	Pekon Sukapura	Pekon Suka Pura Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 490.260.000,00
36	Pekon Way Petai	Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 548.460.000,00
37	Pekon Pura Jaya	Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 402.660.000,00
38	Pekon Pura Wiwitan	Pekon Pura Wiwitan Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 378.360.000,00
39	Pekon Tribudi Syukur	Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 359.160.000,00
40	Pekon Muara Jaya I	Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 334.860.000,00
41	Pekon Muara Jaya II	Pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 407.760.000,00
42	Pekon Tribudi Makmur	Pekon Tribudi Makmur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 310.560.000,00
43	Pekon Tugu Mulya	Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 310.560.000,00
44	Pekon Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 359.160.000,00
45	Pekon Muara Baru	Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 334.860.000,00
46	Pekon Sinar Luas	Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 359.160.000,00
47	Pekon Mutar Alam	Pekon Mutar Allam Kecamatan Way Tenong	Rp. 417.360.000,00
48	Pekon Karang Agung	Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong	Rp. 417.360.000,00
49	Pekon Puralaksana	Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong	Rp. 426.960.000,00
50	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong	Rp. 417.360.000,00
51	Pekon Sukananti	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Rp. 402.660.000,00
52	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong	Rp. 417.360.000,00
53	Pekon Padang Tambak	Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	Rp. 426.960.000,00
54	Pekon Tambak Jaya	Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong	Rp. 417.360.000,00
55	Pekon Sidodadi	Pekon Sidodadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 334.860.000,00
56	Pekon Semarang Jaya	Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 383.460.000,00
57	Pekon Sumber Alam	Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
58	Pekon Gunung Terang	Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
59	Pekon Suka Jadi	Pekon Suka Jadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
60	Pekon Sri Menanti	Pekon Sri Menanti Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
61	Pekon Sinar Jaya	Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 383.460.000,00
62	Pekon Rigis Jaya	Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 334.860.000,00
63	Pekon Suka Damai	Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
64	Pekon Manggarai	Pekon Manggarai Kecamatan Air Hitam	Rp. 359.160.000,00
65	Pekon Kenali	Pekon Kenali Kecamatan Belalau	Rp. 368.760.000,00
66	Pekon Kejadian	Pekon Kejadian Kecamatan Belalau	Rp. 334.860.000,00
67	Pekon Bumi Agung	Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau	Rp. 334.860.000,00

OPD KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
68	Pekon Turgak	Pekon Turgak Kecamatan Belalau	Rp. 310.560.000,00
69	Pekon Bedudu	Pekon Bedudu Kecamatan Belalau	Rp. 310.560.000,00
70	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Rp. 334.860.000,00
71	Pekon Hujung	Pekon Hujung Kecamatan Belalau	Rp. 402.660.000,00
72	Pekon Serungkuk	Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau	Rp. 334.860.000,00
73	Pekon Suka Makmur	Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau	Rp. 359.160.000,00
74	Pekon Fajar Agung	Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau	Rp. 286.260.000,00
75	Pekon Argomulyo	Pekon Argo Mulyo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 383.460.000,00
76	Pekon Batu Kebayan	Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 359.160.000,00
77	Pekon Atar Bawang	Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 359.160.000,00
78	Pekon Campang Tiga	Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 359.160.000,00
79	Pekon Luas	Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 451.260.000,00
80	Pekon Bakhu	Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 441.660.000,00
81	Pekon Way Ngison	Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 359.160.000,00
82	Pekon Kubu Liku Jaya	Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 407.760.000,00
83	Pekon Sumber Rejo	Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 334.860.000,00
84	Pekon Atar Kuwau	Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 407.760.000,00
85	Pekon Pampangan	Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau	Rp. 524.160.000,00
86	Pekon Waspada	Pekon Waspada Kecamatan Sekincau	Rp. 407.760.000,00
87	Pekon Tiga Jaya	Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau	Rp. 465.960.000,00
88	Pekon Giham Sukamaju	Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 499.860.000,00
89	Pekon Pahayu Jaya	Pekon Pahayu Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 393.060.000,00
90	Pekon Basungan	Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 417.360.000,00
91	Pekon Mekar Sari	Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 359.160.000,00
92	Pekon Sidomulyo	Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 524.160.000,00
93	Pekon Sidodadi	Pekon Sido Dadi Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 383.460.000,00
94	Pekon Marga Jaya	Pekon Marga Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 407.760.000,00
95	Pekon Suka Jaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 407.760.000,00
96	Pekon Batu Api	Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 383.460.000,00
97	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 383.460.000,00
98	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 383.460.000,00
99	Pekon Pekon Balak	Pekon Pekon Balak Kecamatan Batu Brak	Rp. 383.460.000,00
100	Pekon Kegeringan	Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	Rp. 407.760.000,00
101	Pekon Kembahang	Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak	Rp. 441.660.000,00
102	Pekon Negeri Ratu	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak	Rp. 359.160.000,00
103	Pekon Kota Besi	Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak	Rp. 465.960.000,00
104	Pekon Sukabumi	Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak	Rp. 432.060.000,00
105	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak	Rp. 310.560.000,00
106	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak	Rp. 286.260.000,00
107	Pekon Canggu	Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak	Rp. 383.460.000,00
108	Pekon Kerang	Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak	Rp. 310.560.000,00
109	Pekon Teba Liyokh	Pekon Teba Liyokh Kecamatan Batu Brak	Rp. 334.860.000,00

OPD KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
110	Pekon Sumber Agung	Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh	Rp. 393.060.000,00
111	Pekon Tuguratu	Pekon Tuguratu Kecamatan Suoh	Rp. 499.860.000,00
112	Pekon Suka Marga	Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh	Rp. 441.660.000,00
113	Pekon Banding Agung	Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh	Rp. 393.060.000,00
114	Pekon Roworejo	Pekon Roworejo Kecamatan Suoh	Rp. 441.660.000,00
115	Pekon Sidorejo	Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh	Rp. 359.160.000,00
116	Pekon Ringin Sari	Pekon Ringin Sari Kecamatan Suoh	Rp. 383.460.000,00
117	Pekon Suoh	Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 597.060.000,00
118	Pekon Srimulyo	Pekon Sri Mulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 334.860.000,00
119	Pekon Bandar Agung	Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 718.560.000,00
120	Pekon Ringin Jaya	Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 393.060.000,00
121	Pekon Bumi Hantatai	Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 490.260.000,00
122	Pekon Gunungratu	Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 417.360.000,00
123	Pekon Tanjungsari	Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 334.860.000,00
124	Pekon Negeri Jaya	Pekon Negeri Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 465.960.000,00
125	Pekon Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 359.160.000,00
126	Pekon Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 359.160.000,00
127	Pekon Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	Rp. 417.360.000,00
128	Pekon Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	Rp. 514.560.000,00
129	Pekon Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	Rp. 499.860.000,00
130	Pekon Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	Rp. 524.160.000,00
131	Pekon Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	Rp. 572.760.000,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA
BESARAN BELANJNA BAGI HASIL PAJAK DAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah **5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan** **Belanja Bagi Hasil**			
A.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Pekon**		
1	Pekon Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 28.342.000,00
2	Pekon Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 33.470.200,00
3	Pekon Wates	Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit	Rp. 36.542.600,00
4	Pekon Padang Dalom	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit	Rp. 28.344.800,00
5	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	Rp. 34.370.000,00
6	Pekon Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	Rp. 48.356.500,00
7	Pekon Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	Rp. 50.086.500,00
8	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	Rp. 35.042.600,00
9	Pekon Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	Rp. 32.614.700,00
10	Pekon Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	Rp. 25.456.200,00
11	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Rp. 49.094.300,00
12	Pekon Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	Rp. 58.145.100,00
13	Pekon Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	Rp. 30.141.100,00
14	Pekon Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	Rp. 25.076.500,00
15	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	Rp. 25.704.300,00
16	Pekon Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	Rp. 28.746.500,00
17	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	Rp. 25.870.200,00
18	Pekon Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	Rp. 25.869.000,00
19	Pekon Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 22.729.600,00
20	Pekon Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 20.688.500,00
21	Pekon Lombok	Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 36.074.200,00
22	Pekon Heni Arong	Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 21.936.000,00
23	Pekon Suka Banjar	Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 23.509.000,00
24	Pekon Lombok Timur	Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 24.782.000,00
25	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 21.719.500,00
26	Pekon Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 23.116.700,00
27	Pekon Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 21.103.200,00
28	Pekon Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 23.805.600,00
29	Pekon Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 19.700.300,00
30	Pekon Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 18.346.000,00
31	Pekon Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 26.701.200,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
32	Pekon Simpang Sari	Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 28.388.500,00
33	Pekon Sukajaya	Pekon Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 32.131.500,00
34	Pekon Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 30.580.800,00
35	Pekon Sukapura	Pekon Suka Pura Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 41.529.100,00
36	Pekon Way Petai	Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 58.840.800,00
37	Pekon Pura Jaya	Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 34.072.800,00
38	Pekon Pura Wiwitan	Pekon Pura Wiwitan Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 34.179.600,00
39	Pekon Tribudi Syukur	Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 27.127.000,00
40	Pekon Muara Jaya I	Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 24.507.700,00
41	Pekon Muara Jaya II	Pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 31.418.100,00
42	Pekon Tribudi Makmur	Pekon Tribudi Makmur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 25.215.800,00
43	Pekon Tugu Mulya	Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 21.927.700,00
44	Pekon Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 21.891.800,00
45	Pekon Muara Baru	Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 20.685.300,00
46	Pekon Sinar Luas	Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 22.061.600,00
47	Pekon Mutar Alam	Pekon Mutar Allam Kecamatan Way Tenong	Rp. 35.939.500,00
48	Pekon Karang Agung	Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong	Rp. 31.698.600,00
49	Pekon Puralaksana	Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong	Rp. 42.131.000,00
50	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong	Rp. 28.646.700,00
51	Pekon Sukananti	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Rp. 31.462.000,00
52	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong	Rp. 29.801.700,00
53	Pekon Padang Tambak	Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	Rp. 36.865.500,00
54	Pekon Tambak Jaya	Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong	Rp. 34.047.300,00
55	Pekon Sidodadi	Pekon Sidodadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 23.453.700,00
56	Pekon Semarang Jaya	Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 26.383.000,00
57	Pekon Sumber Alam	Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam	Rp. 32.035.600,00
58	Pekon Gunung Terang	Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam	Rp. 25.759.600,00
59	Pekon Suka Jadi	Pekon Suka Jadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 21.784.100,00
60	Pekon Sri Menanti	Pekon Sri Menanti Kecamatan Air Hitam	Rp. 22.520.700,00
61	Pekon Sinar Jaya	Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 28.227.500,00
62	Pekon Rigis Jaya	Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 22.176.200,00
63	Pekon Suka Damai	Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam	Rp. 20.157.300,00
64	Pekon Manggarai	Pekon Manggarai Kecamatan Air Hitam	Rp. 21.910.200,00
65	Pekon Kenali	Pekon Kenali Kecamatan Belalau	Rp. 31.994.700,00
66	Pekon Kejadian	Pekon Kejadian Kecamatan Belalau	Rp. 23.886.800,00
67	Pekon Bumi Agung	Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau	Rp. 20.307.100,00
68	Pekon Turgak	Pekon Turgak Kecamatan Belalau	Rp. 21.034.200,00
69	Pekon Bedudu	Pekon Bedudu Kecamatan Belalau	Rp. 24.142.500,00
70	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Rp. 22.410.000,00
71	Pekon Hujung	Pekon Hujung Kecamatan Belalau	Rp. 34.309.000,00
72	Pekon Serungkuk	Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau	Rp. 20.514.600,00
73	Pekon Suka Makmur	Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau	Rp. 19.712.200,00
74	Pekon Fajar Agung	Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau	Rp. 18.851.300,00
75	Pekon Argomulyo	Pekon Argo Mulyo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 25.927.500,00
76	Pekon Batu Kebayan	Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 24.964.000,00
77	Pekon Atar Bawang	Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 24.544.800,00
78	Pekon Campang Tiga	Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 25.424.800,00
79	Pekon Luas	Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 19.365.100,00
80	Pekon Bakhu	Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 30.744.700,00
81	Pekon Way Ngison	Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 26.189.000,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
82	Pekon Kubu Liku Jaya	Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 28.877.600,00
83	Pekon Sumber Rejo	Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 20.123.500,00
84	Pekon Atar Kuwau	Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 22.549.300,00
85	Pekon Pampangan	Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau	Rp. 37.498.000,00
86	Pekon Waspada	Pekon Waspada Kecamatan Sekincau	Rp. 31.650.500,00
87	Pekon Tiga Jaya	Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau	Rp. 33.310.600,00
88	Pekon Giham Sukamaju	Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau	Rp. 64.294.200,00
89	Pekon Pahayu Jaya	Pekon Pahayu Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 37.921.200,00
90	Pekon Basungan	Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 29.401.100,00
91	Pekon Mekar Sari	Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 32.547.500,00
92	Pekon Sidomulyo	Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 49.018.500,00
93	Pekon Sidodadi	Pekon Sido Dadi Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 22.540.100,00
94	Pekon Marga Jaya	Pekon Marga Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 23.271.500,00
95	Pekon Suka Jaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 24.964.500,00
96	Pekon Batu Api	Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 20.405.800,00
97	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 38.858.100,00
98	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 24.271.700,00
99	Pekon Pekon Balak	Pekon Pekon Balak Kecamatan Batu Brak	Rp. 21.899.700,00
100	Pekon Kegeringan	Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	Rp. 28.204.000,00
101	Pekon Kembahang	Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak	Rp. 31.418.000,00
102	Pekon Negeri Ratu	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak	Rp. 21.722.500,00
103	Pekon Kota Besi	Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak	Rp. 32.598.000,00
104	Pekon Sukabumi	Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak	Rp. 29.002.800,00
105	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak	Rp. 24.923.200,00
106	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak	Rp. 18.523.700,00
107	Pekon Canggu	Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak	Rp. 23.099.300,00
108	Pekon Kerang	Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak	Rp. 20.572.800,00
109	Pekon Teba Liyokh	Pekon Teba Liyokh Kecamatan Batu Brak	Rp. 21.146.600,00
110	Pekon Sumber Agung	Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh	Rp. 30.349.100,00
111	Pekon Tuguratu	Pekon Tuguratu Kecamatan Suoh	Rp. 30.246.800,00
112	Pekon Suka Marga	Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh	Rp. 26.063.600,00
113	Pekon Banding Agung	Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh	Rp. 22.435.200,00
114	Pekon Roworejo	Pekon Roworejo Kecamatan Suoh	Rp. 27.382.800,00
115	Pekon Sidorejo	Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh	Rp. 22.475.500,00
116	Pekon Ringin Sari	Pekon Ringin Sari Kecamatan Suoh	Rp. 24.233.300,00
117	Pekon Suoh	Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 28.759.600,00
118	Pekon Srimulyo	Pekon Sri Mulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 23.098.700,00
119	Pekon Bandar Agung	Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 29.554.000,00
120	Pekon Ringin Jaya	Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 18.490.800,00
121	Pekon Bumi Hantatai	Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 24.556.600,00
122	Pekon Gunungratu	Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 23.470.500,00
123	Pekon Tanjungsari	Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 22.399.100,00
124	Pekon Negeri Jaya	Pekon Negeri Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 21.536.800,00
125	Pekon Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 19.669.300,00
126	Pekon Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 27.467.300,00
127	Pekon Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	Rp. 40.437.500,00
128	Pekon Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	Rp. 34.889.600,00
129	Pekon Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	Rp. 44.850.200,00
130	Pekon Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	Rp. 36.495.200,00
131	Pekon Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	Rp. 38.381.300,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
B.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon**		
1	Pekon Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 7.749.300,00
2	Pekon Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	Rp. 2.048.200,00
3	Pekon Wates	Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.756.500,00
4	Pekon Padang Dalom	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.817.600,00
5	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.741.300,00
6	Pekon Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	Rp. 4.165.700,00
7	Pekon Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.688.500,00
8	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.521.000,00
9	Pekon Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	Rp. 2.754.200,00
10	Pekon Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	Rp. 1.749.600,00
11	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Rp. 4.145.700,00
12	Pekon Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	Rp. 1.975.700,00
13	Pekon Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	Rp. 2.445.500,00
14	Pekon Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	Rp. 2.012.300,00
15	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	Rp. 3.042.000,00
16	Pekon Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	Rp. 1.835.000,00
17	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	Rp. 1.547.200,00
18	Pekon Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	Rp. 1.812.500,00
19	Pekon Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 1.520.000,00
20	Pekon Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Jaya Kecamatan Sukau	Rp. 1.649.000,00
21	Pekon Lombok	Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 6.850.300,00
22	Pekon Heni Arong	Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.054.800,00
23	Pekon Suka Banjar	Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.170.500,00
24	Pekon Lombok Timur	Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.044.200,00
25	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.060.000,00
26	Pekon Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.167.800,00
27	Pekon Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.040.200,00
28	Pekon Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.177.000,00
29	Pekon Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.031.300,00
30	Pekon Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.029.000,00
31	Pekon Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	Rp. 1.310.300,00
32	Pekon Simpang Sari	Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 11.158.700,00
33	Pekon Sukajaya	Pekon Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 1.658.000,00
34	Pekon Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 1.654.200,00
35	Pekon Sukapura	Pekon Suka Pura Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 1.652.200,00
36	Pekon Way Petai	Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya	Rp. 2.486.000,00
37	Pekon Pura Jaya	Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 7.754.800,00
38	Pekon Pura Wiwitan	Pekon Pura Wiwitan Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.534.000,00
39	Pekon Tribudi Syukur	Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.544.500,00
40	Pekon Muara Jaya I	Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.320.000,00
41	Pekon Muara Jaya II	Pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.310.500,00
42	Pekon Tribudi Makmur	Pekon Tribudi Makmur Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.281.000,00
43	Pekon Tugu Mulya	Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.218.300,00
44	Pekon Cipta Mulya	Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.232.500,00
45	Pekon Muara Baru	Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.356.000,00
46	Pekon Sinar Luas	Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu	Rp. 1.296.000,00
47	Pekon Mutar Alam	Pekon Mutar Allam Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.433.500,00
48	Pekon Karang Agung	Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong	Rp. 2.350.800,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
49	Pekon Puralaksana	Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.414.000,00
50	Pekon Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.415.200,00
51	Pekon Sukananti	Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong	Rp. 2.014.500,00
52	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.762.500,00
53	Pekon Padang Tambak	Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.710.500,00
54	Pekon Tambak Jaya	Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong	Rp. 1.482.000,00
55	Pekon Sidodadi	Pekon Sidodadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.247.500,00
56	Pekon Semarang Jaya	Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.143.000,00
57	Pekon Sumber Alam	Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.194.200,00
58	Pekon Gunung Terang	Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.402.500,00
59	Pekon Suka Jadi	Pekon Suka Jadi Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.188.600,00
60	Pekon Sri Menanti	Pekon Sri Menanti Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.203.300,00
61	Pekon Sinar Jaya	Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.064.300,00
62	Pekon Rigis Jaya	Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.063.700,00
63	Pekon Suka Damai	Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.042.200,00
64	Pekon Manggarai	Pekon Manggarai Kecamatan Air Hitam	Rp. 1.042.500,00
65	Pekon Kenali	Pekon Kenali Kecamatan Belalau	Rp. 4.318.700,00
66	Pekon Kejadian	Pekon Kejadian Kecamatan Belalau	Rp. 1.113.600,00
67	Pekon Bumi Agung	Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau	Rp. 1.050.000,00
68	Pekon Turgak	Pekon Turgak Kecamatan Belalau	Rp. 1.171.000,00
69	Pekon Bedudu	Pekon Bedudu Kecamatan Belalau	Rp. 1.337.600,00
70	Pekon Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Belalau	Rp. 1.131.800,00
71	Pekon Hujung	Pekon Hujung Kecamatan Belalau	Rp. 1.107.600,00
72	Pekon Serungkuk	Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau	Rp. 1.037.000,00
73	Pekon Suka Makmur	Pekon Suka Makmur Kecamatan Belalau	Rp. 1.031.800,00
74	Pekon Fajar Agung	Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau	Rp. 1.028.000,00
75	Pekon Argomulyo	Pekon Argo Mulyo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.246.700,00
76	Pekon Batu Kebayan	Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.317.700,00
77	Pekon Atar Bawang	Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.205.500,00
78	Pekon Campang Tiga	Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.065.200,00
79	Pekon Luas	Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.118.200,00
80	Pekon Bakhu	Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.350.000,00
81	Pekon Way Ngison	Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.123.200,00
82	Pekon Kubu Liku Jaya	Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.080.200,00
83	Pekon Sumber Rejo	Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.035.000,00
84	Pekon Atar Kuwau	Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis	Rp. 1.053.200,00
85	Pekon Pampangan	Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau	Rp. 1.411.500,00
86	Pekon Waspada	Pekon Waspada Kecamatan Sekincau	Rp. 1.475.000,00
87	Pekon Tiga Jaya	Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau	Rp. 1.455.600,00
88	Pekon Giham Sukamaju	Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau	Rp. 3.320.600,00
89	Pekon Pahayu Jaya	Pekon Pahayu Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.780.200,00
90	Pekon Basungan	Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.649.000,00
91	Pekon Mekar Sari	Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.222.500,00
92	Pekon Sidomulyo	Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.346.200,00
93	Pekon Sidodadi	Pekon Sido Dadi Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.178.200,00
94	Pekon Marga Jaya	Pekon Marga Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.206.300,00
95	Pekon Suka Jaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.080.500,00
96	Pekon Batu Api	Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.038.200,00
97	Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.102.500,00
98	Pekon Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa	Rp. 1.113.000,00

OPD | KABAG HUKUM

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
99	Pekon Pekon Balak	Pekon Pekon Balak Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.721.000,00
100	Pekon Kegeringan	Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.355.500,00
101	Pekon Kembahang	Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.293.000,00
102	Pekon Negeri Ratu	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.199.300,00
103	Pekon Kota Besi	Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.912.600,00
104	Pekon Sukabumi	Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.277.000,00
105	Pekon Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.045.500,00
106	Pekon Sukaraja	Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.100.500,00
107	Pekon Canggu	Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.059.000,00
108	Pekon Kerang	Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.035.500,00
109	Pekon Teba Liyokh	Pekon Teba Liyokh Kecamatan Batu Brak	Rp. 1.044.200,00
110	Pekon Sumber Agung	Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh	Rp. 1.417.600,00
111	Pekon Tuguratu	Pekon Tuguratu Kecamatan Suoh	Rp. 1.348.500,00
112	Pekon Suka Marga	Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh	Rp. 1.384.500,00
113	Pekon Banding Agung	Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh	Rp. 1.841.000,00
114	Pekon Roworejo	Pekon Roworejo Kecamatan Suoh	Rp. 1.228.000,00
115	Pekon Sidorejo	Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh	Rp. 1.112.700,00
116	Pekon Ringin Sari	Pekon Ringin Sari Kecamatan Suoh	Rp. 1.066.600,00
117	Pekon Suoh	Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.885.500,00
118	Pekon Srimulyo	Pekon Sri Mulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.438.000,00
119	Pekon Bandar Agung	Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.807.000,00
120	Pekon Ringin Jaya	Pekon Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.345.500,00
121	Pekon Bumi Hantatai	Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.298.500,00
122	Pekon Gunungratu	Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.421.500,00
123	Pekon Tanjungsari	Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.049.200,00
124	Pekon Negeri Jaya	Pekon Negeri Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.116.500,00
125	Pekon Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.267.800,00
126	Pekon Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp. 1.071.000,00
127	Pekon Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	Rp. 1.117.800,00
128	Pekon Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	Rp. 1.408.500,00
129	Pekon Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	Rp. 2.474.200,00
130	Pekon Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	Rp. 1.338.600,00
131	Pekon Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	Rp. 1.409.800,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINA

NO	JABATAN	PARA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL						

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN AHUN ANGGARAN 2026

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp.)
		Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tranfer (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nihil										

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN KEPALA DAERAH PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
1	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
3	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
4	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.149.527.565,00	5.104.467.800,00	0,00	0,00	26.253.995.365,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler
5	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.077.396.000,00	0,00	0,00	0,00	4.077.396.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
6	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
7	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
8	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.944.729.200,00	2.388.910.800,00	0,00	0,00	12.333.640.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler
9	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.942.378.800,00	0,00	0,00	0,00	3.942.378.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
10	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.780.388.000,00	108.112.000,00	0,00	0,00	2.888.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
11	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	74.626.000,00	0,00	0,00	0,00	74.626.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

OPD KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
12	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	83.817.000,00	0,00	0,00	0,00	83.817.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
13	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	91.556.000,00	0,00	0,00	0,00	91.556.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
14	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	604.000.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
15	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	158.591.000,00	0,00	0,00	0,00	158.591.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
16	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	622.324.000,00	80.026.000,00	0,00	0,00	702.350.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kineria
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
17	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.936.000,00	0,00	0,00	0,00	8.936.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
18	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.172.400,00	0,00	0,00	0,00	1.172.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
19	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
20	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
21	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
22	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.674.500,00	0,00	0,00	0,00	7.674.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
23	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	276.168.748.348,00	0,00	0,00	0,00	276.168.748.348,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daera h-Tambahan Penghasilan Guru Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
24	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.736.600,00	0,00	0,00	0,00	1.736.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
25	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.729.600,00	0,00	0,00	0,00	5.729.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
26	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
27	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.474.600,00	0,00	0,00	0,00	2.474.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

OPD KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
28	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8.468.600,00	0,00	0,00	0,00	8.468.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
29	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
30	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
31	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
32	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.719.800,00	0,00	0,00	0,00	12.719.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
33	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.153.600,00	0,00	0,00	0,00	39.153.600,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
34	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
35	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
36	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.108.300,00	0,00	0,00	0,00	144.108.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
37	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
38	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
39	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.823.760.000,00	0,00	0,00	0,00	6.823.760.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
40	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.650.000,00	0,00	0,00	0,00	36.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
41	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
42	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	35.736.000,00	0,00	0,00	0,00	35.736.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							

OPD KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
43	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
44	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
45	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	149.175.000,00	0,00	0,00	0,00	149.175.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							
46	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	64.264.000,00	0,00	0,00	0,00	64.264.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)							
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
47	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.923.077,00	0,00	0,00	0,00	14.923.077,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
48	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.154.900,00	0,00	0,00	0,00	27.154.900,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.403.500,00	0,00	0,00	0,00	2.403.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.961.200,00	0,00	0,00	0,00	3.961.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
51	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
52	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.577.530,00	186.433.180,00	0,00	0,00	190.010.710,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
53	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.400.000,00	0,00	0,00	0,00	65.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

OPD | KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
55	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.545.000,00	4.329.000,00	0,00	0,00	14.874.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
56	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.378.600,00	0,00	0,00	0,00	21.378.600,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan							
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
57	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	44.033.200,00	150.966.800,00	0,00	0,00	195.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
58	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	141.568.000,00	0,00	0,00	0,00	141.568.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
59	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.682.241.500,00	0,00	0,00	0,00	2.682.241.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)
60	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	103.052.000,00	0,00	0,00	0,00	103.052.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
61	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.675.000,00	0,00	0,00	0,00	95.675.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
62	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
63	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	663.789.500,00	0,00	0,00	0,00	663.789.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
64	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
65	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	72.750.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
66	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	145.750.000,00	0,00	0,00	0,00	145.750.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
67	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
68	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

OPD KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1955	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.057.000,00	0,00	0,00	0,00	5.057.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1956	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.655.000,00	0,00	0,00	0,00	5.655.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1957	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.943.000,00	0,00	0,00	0,00	6.943.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1958	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00	6.535.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1959	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.835.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1960	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1961	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.902.200,00	0,00	0,00	0,00	8.902.200,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1962	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	247.091.040,00	0,00	0,00	0,00	247.091.040,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1963	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1964	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1965	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00	6.773.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1966	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.838.000,00	0,00	0,00	0,00	5.838.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1967	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.266.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1968	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1969	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.057.500,00	0,00	0,00	0,00	17.057.500,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1970	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.515.000,00	0,00	0,00	0,00	24.515.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1971	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1972	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1973	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.782.000,00	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

OPD | KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1974	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.475.000,00	0,00	0,00	0,00	44.475.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1975	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1976	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.646.000,00	0,00	0,00	0,00	15.646.000,00	Kab. Lampung Barat, Lumbok Seminung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
	8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**							
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
1977	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Pajak Rokok
1978	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	649.999.718,00	0,00	0,00	0,00	649.999.718,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**							
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
1979	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	719.765.253,00	0,00	0,00	0,00	719.765.253,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PKB

OPD KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
1980	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	315.064.000,00	0,00	0,00	0,00	315.064.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PKB
1981	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	99.555.000,00	0,00	0,00	0,00	99.555.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
1982	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	107.499.700,00	0,00	0,00	0,00	107.499.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
1983	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.999.800,00	0,00	0,00	0,00	64.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
1984	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	91.451.600,00	0,00	0,00	0,00	91.451.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Pajak Rokok
1985	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.064.999.800,00	0,00	0,00	0,00	1.064.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Pajak Rokok

OPD | KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1986	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.766.000,00	0,00	0,00	0,00	18.766.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1987	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.872.000,00	0,00	0,00	0,00	2.872.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1988	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00	5.859.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1989	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1990	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1991	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.709.000,00	0,00	0,00	0,00	3.709.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1992	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.086.000,00	0,00	0,00	0,00	6.086.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1993	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.801.965.923,00	0,00	0,00	0,00	1.801.965.923,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1994	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	2.678.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1995	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
1996	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.708.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1997	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.798.000,00	0,00	0,00	0,00	4.798.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1998	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.773.000,00	0,00	0,00	0,00	8.773.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1999	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.746.800,00	0,00	0,00	0,00	2.746.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2001	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2002	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.814.000,00	0,00	0,00	0,00	5.814.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2003	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.990.000,00	0,00	0,00	0,00	72.990.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2004	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)

OPD | KABAG HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
2005	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2006	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.777.900,00	0,00	0,00	0,00	74.777.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2007	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.950.000,00	0,00	0,00	0,00	21.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)
2008	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Alokasi Umum (DAU)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.802.086.572,00		110.794.617.999,00	
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				58.000.321.565,00		15.821.836.200,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				58.000.321.565,00		15.821.836.200,00	
		5,1	BELANJA OPERASI		50.218.804.965,00		15.721.836.200,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		43.582.594.965,00		15.721.836.200,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		8.108.893.200,00		8.108.893.200,00	
		5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis		8.108.893.200,00		8.108.893.200,00	
		5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,00	122.671.400,00		122.671.400,00	
		5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80,00	14.985.000,00		14.985.000,00	
		5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	80,00	4.579.000,00		4.579.000,00	
		5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80,00	330.000,00		330.000,00	
		5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80,00	14.000.000,00		14.000.000,00	
		5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80,00	3.900.000,00		3.900.000,00	
		5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	80,00	27.450.000,00		27.450.000,00	
		5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80,00	1.775.800,00		1.775.800,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,00	7.818.274.000,00		7.818.274.000,00	
		5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
		5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,00	96.928.000,00		96.928.000,00	
		5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80,00	19.600.000,00		19.600.000,00	
		5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	80,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	80,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80,00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	80,00	600.000,00		600.000,00	
		5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	80,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	80,00	3.060.000,00		3.060.000,00	
		5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80,00	18.000.000,00		18.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	80,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80,00	18.250.000,00		18.250.000,00	
		5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80,00	40.440.000,00		40.440.000,00	
		5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	100,00	3.252.000.000,00		3.252.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	3.523.200.000,00		3.523.200.000,00	
		5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	80,00	7.450.000,00		7.450.000,00	
		5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	80,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
		5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	80,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90,00	18.400.000,00		18.400.000,00	
		5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
		5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,00	186.458.000,00		186.458.000,00	

OPD KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	124.560.000,00		124.560.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	134.075.000,00		134.075.000,00	
		5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	93,33	157.500.000,00		157.500.000,00	
		5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0	26.568.716.765,00		0,00	
		5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0	837.000.000,00		0,00	
		5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0	398.798.000,00		0,00	
		5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0	56.244.000,00		0,00	
		5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0	0,00		0,00	
		5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0	3.688.540.000,00		0,00	
		5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0	2.381.590.000,00		0,00	
		5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0	566.080.000,00		0,00	
		5,2	BELANJA MODAL		7.781.516.600,00		100.000.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		3.099.328.800,00		0,00	
		5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		3.099.328.800,00		0,00	
		5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS		3.005.007.800,00		0,00	
		5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0	3.005.007.800,00		0,00	
		5.2.02.89.001.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0	0,00		0,00	
		5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	0	34.340.000,00		0,00	
		5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0	59.981.000,00		0,00	
		5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80,00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0	4.488.370.800,00		0,00	
		5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0	0,00		0,00	
		5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	0	73.772.000,00		0,00	
		5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0	20.045.000,00		0,00	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				98.254.371.392,00		54.480.052.184,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan				30.682.965.544,00		30.197.755.344,00	
		5,1	BELANJA OPERASI		30.351.063.244,00		29.865.853.044,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		30.351.063.244,00		29.865.853.044,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		5.359.239.800,00		5.127.005.600,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis		5.343.599.800,00		5.111.365.600,00	
		5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80,00	1.440.000,00		1.440.000,00	
		5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	90,25	2.605.540.000,00		2.605.540.000,00	
		5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86,67	267.667.200,00		35.433.000,00	
		5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80,00	37.440.000,00		37.440.000,00	
		5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	81,13	83.829.400,00		83.829.400,00	
		5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,20	304.418.000,00		304.418.000,00	
		5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80,00	35.931.000,00		35.931.000,00	
		5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	85,85	75.145.000,00		75.145.000,00	
		5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80,00	6.470.000,00		6.470.000,00	
		5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80,00	29.897.500,00		29.897.500,00	
		5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	82,35	31.784.900,00		31.784.900,00	
		5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80,00	14.780.900,00		14.780.900,00	
		5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80,00	14.473.400,00		14.473.400,00	
		5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	87,00	1.521.091.000,00		1.521.091.000,00	
		5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80,00	4.572.000,00		4.572.000,00	
		5.1.02.01.001.00049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	89,00	128.100.000,00		128.100.000,00	
		5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,00	136.981.000,00		136.981.000,00	
		5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	80,00	850.500,00		850.500,00	
		5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80,00	43.188.000,00		43.188.000,00	
		5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	98,00	15.640.000,00		15.640.000,00	
		5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80,00	162.600.000,00		162.600.000,00	
		5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	80,00	163.020.000,00		163.020.000,00	
		5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	80,00	18.000.000,00		18.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	89,00	71.700.000,00		71.700.000,00	
		5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80,00	25.200.000,00		25.200.000,00	
		5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	80,00	43.200.000,00		43.200.000,00	
		5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80,00	85.300.000,00		85.300.000,00	
		5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	80,00	43.200.000,00		43.200.000,00	

OPD KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	80,00	2.400.000,00		2.400.000,00	
		5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	80,00	91.200.000,00		91.200.000,00	
		5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	80,00	6.840.000,00		6.840.000,00	
		5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80,00	16.370.000,00		16.370.000,00	
		5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	94,73	663.731.500,00		663.731.500,00	
		5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80,00	57.650.000,00		38.400.000,00	
		5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80,00	217.920.000,00		217.920.000,00	
		5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	100,00	4.550.400.000,00		4.550.400.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	2.146.800.000,00		2.146.800.000,00	
		5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80,00	2.709.674.344,00		2.709.674.344,00	
		5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	80,00	10.255.845.600,00		10.255.845.600,00	
		5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	80,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
		5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80,00	28.800.000,00		28.800.000,00	
		5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	80,00	1.050.000,00		1.050.000,00	
		5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	80,00	36.090.000,00		36.090.000,00	
		5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	80,00	28.000.000,00		28.000.000,00	
		5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	80,00	697.666.000,00		697.666.000,00	
		5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	170.000.000,00		0,00	
		5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90,00	18.400.000,00		18.400.000,00	
		5.1.02.03.002.00086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	44,57	124.799.000,00		61.073.000,00	
		5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	80,00	9.000.000,00		9.000.000,00	
		5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80,00	24.624.000,00		24.624.000,00	
		5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,00	626.658.000,00		626.658.000,00	
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	528.990.000,00		528.990.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	842.595.000,00		842.595.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	80,00	8.441.000,00		8.441.000,00	
		5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	80,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	80,00	600.000,00		600.000,00	
		5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	80,00	3.600.000,00		3.600.000,00	
		5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	80,00	3.960.000,00		3.960.000,00	
		5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80,00	250.000,00		250.000,00	
		5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80,00	12.840.000,00		12.840.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
		5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80,00	9.500.000,00		9.500.000,00	
		5.1.02.02.005.00039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	80,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
		5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	80,00	1.460.000,00		1.460.000,00	
		5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	80,00	1.380.000,00		1.380.000,00	
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	28.545.000,00		28.545.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	3.800.000,00		3.800.000,00	
7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh				268.000.000,00		268.000.000,00	
		5,1	BELANJA OPERASI		268.000.000,00		268.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		136.030.000,00		136.030.000,00	
		5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis		136.030.000,00		136.030.000,00	
		5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,00	46.236.000,00		46.236.000,00	
		5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80,00	630.000,00		630.000,00	
		5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80,00	3.800.000,00		3.800.000,00	
		5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,00	85.364.000,00		85.364.000,00	
		5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80,00	3.780.000,00		3.780.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	34.800.000,00		34.800.000,00	
		5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80,00	5.850.000,00		5.850.000,00	
		5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	80,00	700.000,00		700.000,00	
		5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	80,00	7.500.000,00		7.500.000,00	

OPD KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	57.090.000,00		57.090.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	7.250.000,00		7.250.000,00	
7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Lumbok Seminung				279.999.700,00		279.999.700,00	
		5,1	BELANJA OPERASI		279.999.700,00		279.999.700,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		157.184.700,00		157.184.700,00	
		5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis		157.184.700,00		157.184.700,00	
		5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80,00	21.956.000,00		21.956.000,00	
		5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,00	43.987.200,00		43.987.200,00	
		5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80,00	7.901.000,00		7.901.000,00	
		5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	80,00	2.150.000,00		2.150.000,00	
		5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80,00	6.875.000,00		6.875.000,00	
		5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80,00	5.838.000,00		5.838.000,00	
		5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80,00	8.355.000,00		8.355.000,00	
		5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80,00	16.982.500,00		16.982.500,00	
		5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,00	43.140.000,00		43.140.000,00	
		5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	80,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
		5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	80,00	600.000,00		600.000,00	
		5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	80,00	600.000,00		600.000,00	
		5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	80,00	2.400.000,00		2.400.000,00	
		5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	80,00	2.280.000,00		2.280.000,00	
		5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80,00	3.600.000,00		3.600.000,00	
		5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80,00	250.000,00		250.000,00	
		5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80,00	11.640.000,00		11.640.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	80,00	5.500.000,00		5.500.000,00	
		5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,00	4.250.000,00		4.250.000,00	
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	54.495.000,00		54.495.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				1.532.333.318,00		1.531.833.318,00	
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.532.333.318,00		1.531.833.318,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
8.01.0.00.0.00.26.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.532.333.318,00		1.531.833.318,00	
		5,1	BELANJA OPERASI		1.532.333.318,00		1.531.833.318,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		702.265.318,00		702.265.318,00	
		5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis		702.265.318,00		702.265.318,00	
		5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80,00	560.000,00		560.000,00	
		5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	80,00	1.560.000,00		1.560.000,00	
		5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80,00	200.000,00		200.000,00	
		5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,00	88.079.800,00		88.079.800,00	
		5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	80,00	33.861.000,00		33.861.000,00	
		5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	80,00	10.300.000,00		10.300.000,00	
		5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	80,00	8.250.000,00		8.250.000,00	
		5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80,00	11.228.268,00		11.228.268,00	
		5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80,00	2.746.800,00		2.746.800,00	
		5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	81,18	72.420.000,00		72.420.000,00	
		5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	80,00	31.390.000,00		31.390.000,00	
		5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	80,00	2.680.000,00		2.680.000,00	
		5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	82,22	5.761.300,00		5.761.300,00	
		5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	80,00	591.150,00		591.150,00	
		5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	80,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
		5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80,00	146.680.000,00		146.680.000,00	
		5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80,00	17.344.000,00		17.344.000,00	
		5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,00	26.354.000,00		26.354.000,00	
		5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	80,00	31.775.000,00		31.775.000,00	
		5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80,00	191.484.000,00		191.484.000,00	
		5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80,00	35.200.000,00		34.700.000,00	
		5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80,00	66.000.000,00		66.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	84,00	97.800.000,00		97.800.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	80,00	10.850.000,00		10.850.000,00	
		5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100,00	2.600.000,00		2.600.000,00	
		5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80,00	6.500.000,00		6.500.000,00	
		5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	80,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	80,00	17.000.000,00		17.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	80,00	300.000,00		300.000,00	
		5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80,00	22.000.000,00		22.000.000,00	
		5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	80,00	900.000,00		900.000,00	
		5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	80,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
		5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	80,00	2.400.000,00		2.400.000,00	
		5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	80,00	7.020.000,00		7.020.000,00	
		5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80,00	3.780.000,00		3.780.000,00	
		5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	90,00	3.550.000,00		3.550.000,00	
		5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	80,00	15.120.000,00		15.120.000,00	
		5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	100,00	31.200.000,00		31.200.000,00	
		5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	80,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
		5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	80,00	7.500.000,00		7.500.000,00	
		5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	80,00	750.000,00		750.000,00	
		5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	82,86	5.350.000,00		5.350.000,00	
		5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	80,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	80,00	12.000.000,00		12.000.000,00	
		5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80,00	0,00		0,00	
		5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	93,33	20.150.000,00		20.150.000,00	
		5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	80,00	2.920.000,00		2.920.000,00	
		5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	80,00	0,00		0,00	

OPD | KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,00	232.458.000,00		232.458.000,00	
		5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,00	41.520.000,00		41.520.000,00	
		5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,00	66.000.000,00		66.000.000,00	
		5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	80,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
		5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	80,00	7.500.000,00		7.500.000,00	
		5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	80,00	65.000.000,00		65.000.000,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					**297.846.102.508,00**			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					**211.280.344.135,00**			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					**70,94%**			

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7	B. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	